

## Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018

Eka Agustiani

Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

\*Corresponding Email: [ekaagustiani27@gmail.com](mailto:ekaagustiani27@gmail.com)

---

### Info Artikel

*Kata Kunci:*

APBD, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan SILPA.

### ABSTRAK

Analisis Determinan SILPA Kabupaten Lombok Utara 2009-2018 bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi dana bagi hasil, realisasi dana alokasi khusus, dan realisasi dana alokasi umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2018.

Pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumentasi. Pendekatan kuantitatif melalui pengumpulan data sekunder berupa data time series. Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan Uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dengan tingkat alfa 5%, uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Dengan Uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

Hasil menunjukkan secara parsial variabel realisasi dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), variabel realisasi dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), variabel realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Rekomendasi yang diajukan agar pemerintah lebih inovatif dalam penyusunan APBD. Penentuan prioritas plafon anggaran dan melakukan penyesuaian terkait komponen-komponen dalam APBD agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

---

### ABSTRACT

*Keywords:*

APBD, profit sharing fund, general allocation fund, special allocation fund and SILPA.

*The Analysis of Factors Affecting the Rest of the Financing (SILPA) of North Lombok Regency in 2009-2018 aims to analyze the effect of the realization of revenue sharing funds, the realization of special allocation funds, and the realization of general allocation funds towards the Over the Budget (SILPA) of North Lombok Regency 2009-2018.*

*Data collection by library study and documentation. Quantitative approach through secondary data collection in the form of time series data with multiple linear regression analysis and hypothesis testing with partial test (t test), simultaneous test (F test) with an alpha level of 5%, coefficient of determination*

*test (R<sup>2</sup>). The classic assumption test of the Normality Test, the Multicollinearity Test, the Heteroscedasticity Test and the Autocorrelation Test.*

*The results show partially the realization of the variable funds for the positive effect but not significant to the rest of the excess budget financing (SILPA), the variable realization of the general allocation fund has a positive and significant effect on the remaining excess budget financing (SILPA), the variable realization of the special allocation fund has a positive effect but is not significant to the remaining budget financing (SILPA). The recommendations are proposed so that the government is more innovative in preparing the APBD. Determination of budget ceiling priorities and make adjustments related to the components in the APBD to suit the development needs.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya dengan implementasi otonomi daerah. Tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia adalah agar terwujudnya tingkat efisiensi dan efektifitas pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus dilakukan secara efisien dan efektif, karena APBD memiliki peranan yang penting dalam pembangunan daerah (Makhfath, 2014).

Menurut Ramadhan (2015) jika perencanaan dan pelaksanaan APBD buruk dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan dan tidak terlaksananya program dan kegiatan sehingga menghasilkan Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA/SIKPA) yang tinggi pada tahun berkenaan. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah rendahnya daya serap anggaran. SILPA muncul karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih minim, sehingga terdapat realisasi pendapatan yang lebih dari yang

dianggarkan. Hakim (2016) mengatakan terjadinya SILPA juga karena adanya program pemerintah yang belum terselesaikan serta adanya pembatalan proyek yang hendak dilaksanakan.

Menurut Suharna (2015) bahwa dari komponen-komponen APBD, yang berpengaruh besar terhadap SILPA berasal dari pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah.

Dana transfer pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah sebagai sumber pendapatan dalam APBD, selanjutnya di pergunakan untuk membiayai program pemerintah seharusnya dapat di gunakan secara maksimal. Namun realita menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya tepat waktu di realisasikan oleh pemerintah daerah namun pada akhir tahun anggaran menjadi SILPA.

Kabupaten Lombok Utara sebagai Kabupaten termuda di Provinsi NTB memiliki kondisi keuangan APBD dari segi pendapatan cenderung mengalami peningkatan baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Data APBD Kabupaten Lombok Utara dari segi dana perimbangan selama sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1. Dana Perimbangan APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2018

Tahun	Dana Perimbangan		
	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
2009	21.106.284.220,00	162.614.416.000,00	3.300.000.000,00
2010	16.154.732.000,00	229.577.912.000,00	34.767.723.850,00
2011	29.389.359.740,00	246.356.652.000,00	35.107.000.000,00
2012	29.633.154.668,00	275.520.014.000,00	39.153.120.000,00
2013	24.086.840.362,00	314.808.074.000,00	65.187.990.000,00
2014	23.573.560.603,00	339.993.327.000,00	53.168.730.000,00
2015	15.801.782.446,00	362.867.848.000,00	91.023.650.000,00
2016	67.008.782.774,00	398.209.000.000,00	141.577.672.936,00
2017	57.981.319.310,00	392.932.943.000,00	158.431.700.473,00
2018	43.313.872.057,00	392.932.943.000,00	167.347.499.619,00

Sumber. BPKAD Kabupaten Lombok Utara

Anggaran berupa transfer dari pemerintah pusat ini tentunya diharapkan dapat direalisasikan dengan maksimal untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan tentunyaa memaksimalkan pelayanan publik. Namun berdasarkan data APBD Kabupaten Lombok Utara ditemukan anggaran yang ternyata masih tidak terpakai atau tersisa (SILPA).

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang diajukan sebagai berikut “apakah dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh secara simultan maupun parsill terhadap SILPA Kabupaten Lombok Utara” dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009- 2018.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2018. Sumbernya data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data runtun waktu *times series*.

Variabel Dependen yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Variabel Independenya adalah dana bagi hasil, dana

alokasi umum, dan dana alokasi khusus Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2018.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah model regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Dengan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e_i$$

Keterangan :

Y = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

$\beta_0$  = Intersep/Konstanta

$x_1$  = Dana Bagi Hasil (DBH)

$x_2$  = Dana Alokasi Umum (DAU)

$x_3$  = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$e_i$  = Variabel Pengganggu

$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$  = Koefisien regresi

### Pengujian Hipotesis

Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t ini merupakan pengujian variabel-variabel independen secara individu, dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing

variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen, dengan beranggapan variabel independen lain tetap atau konstan. Langkah-langkah pengujian t test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003: 119):

- Menentukan  $H_0$  dan  $H_a$
- Menentukan taraf nyata ( $\alpha = 5\%$ )
- Kriteria Pengujian
- Statistik Uji
- Kesimpulan

#### **b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Uji F ini merupakan pengujian secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen apakah berpengaruh signifikan. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003: 134).

- Rumusan  $H_0$  dan  $H_a$
- Menentukan taraf nyata ( $\alpha = 5\%$ )
- Kriteria Pengujian
- Statistik uji
- Kesimpulan

#### **c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independent secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependent dimana nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ) semakin besar  $R^2$  maka semakin besar variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

##### **a. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah didalam model yang diteliti mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka perlu diadakan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik dengan beberapa langkah uji. Berikut uji asumsi klasik:

##### **b. Uji Autokorelasi**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi diantara variabel pengganggu, artinya gangguan yang terjadi pada suatu titik atau

periode pengamatan tidak berhubungan dengan titik atau pengamatan lainnya. Untuk mengetahui deteksi gejala autokorelasi dapat dilihat pada nilai Durbin-Watson pada output SPSS yang disebut dengan DW hitung. Angka ini akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai  $d_L$  dan  $d_U$  ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi ( $k$ ) dan jumlah sampelnya ( $n$ ). Nilai  $d_L$  dan  $d_U$  dapat dilihat pada tabel DW dengan tingkat signifikansi (error) 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

Pada hasil analisis penelitian tahun 2009-2018 di Kabupaten Lombok Utara diperoleh nilai  $d_L = 0,525$  dan  $d_U = 2.016$  sehingga dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi. Nilai DW hitung sebesar 2.165 lebih besar dari 2.016 dan kurang dari 3.475 yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

##### **c. Uji Multikolenieritas**

Multikolenieritas untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel independent dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi antara variabel independent maka hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent terganggu. Ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai VIF pada tabel pengujian. Jika nilai VIF  $> 10$  maka terdapat penyakit atau masalah Multikolenieritas, sebaliknya jika nilai VIF  $< 10$  maka tidak terdapat masalah Multikolenieritas.

Pada hasil analisis tahun 2009-2018 di Kabupaten Lombok Utara didapatkan bahwa nilai VIF pada dana bagi hasil sebesar 6.568, dana alokasi khusus sebesar 5.779, dan dana alokasi umum sebesar 4.625. Karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolenieritas pada ketiga variabel tersebut.

##### **d. Uji Normalitas**

Pengujian uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari gambar Normal P-P Plot. Kriteria sebuah (data) residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan Normal P-P Plot dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal) maka dikatakan bahwa (data) residual terdistribusi normal, namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis maka tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil analisis sebaran titik-titik dari gambar Normal P-P Plot relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa (data) residual terdistribusi normal.

#### e. Uji Heteroskedastisitas

Masalah heteroskedastisitas terjadi apabila varian untuk setiap variabel pengganggu tidak mempunyai varians yang sama untuk setiap observasi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat Scatterplot (alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang telah distandarisasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar Scatterplot.

Pada hasil analisis penelitian tahun 2009-2018 di Kabupaten Lombok Utara didapatkan bahwa sebaran titik membentuk suatu polar atau alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain tidak terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam modal ini tidak terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Regresi Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	624.972	482.165		.013	.990		
	X1	.794	.367	.433	2.163	.067	.015	6.568
	X2	.153	.036	.782	4.283	.004	.019	5.779
	X3	.163	.126	.216	1.288	.239	.022	4.625

a. Dependent Variable: Y

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275.000	3	917.000	535.803	.000 <sup>b</sup>
	Residual	119.000	7	171.000		
	Total	276.000	10			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data sekunder diolah 2020

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{SILPA} = 624.972 + 0.794 X1 - 0.153 X2 + 0.163 X3 + e_i$$

#### Uji F

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $F$  (nilai-p) sebesar 0,000. Dapat dinyatakan bahwa nilai-p < 0,05, dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $535,803 > 4,35$ , sehingga dapat simpulkan bahwa variabel dana bagi hasil, realisasi dana alokasi umum, dan realisasi dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap SILPA.

#### Uji t

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa secara parsial variabel realisasi dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap SILPA. Sedangkan variabel realisasi dana bagi hasil dan realisasi dana alokasi khusus diketahui secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap SILPA, maka hipotesis ditolak.

### Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa nilai *R-square* 99,6% dan *adjusted R-square* 99,4%. Pada penelitian ini pengukuran kemampuan model ini menggunakan *adjusted R-square* karena mampu menjelaskan kemampuan model lebih baik. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki kemampuan 99,4% dalam menjelaskan variasi dependen. Sedangkan 99,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

### Pembahasan

#### a. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Penelitian membuktikan bahwa realisasi dana bagi hasil berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Yang ditunjukkan berdasarkan nilai *t* hitung sebesar 2.163 dan nilai probabilitas *t* hitung sebesar 0.067 lebih besar dari taraf nyata 5% ( $0.067 > 0.05$ ). Hasil koefisien regresi sebesar 0.794. Artinya semakin meningkatnya jumlah realisasi dana bagi hasil akan menambah jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Setiap penambahan 1 miliar rupiah dana bagi hasil maka akan menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0.794 miliar rupiah.

Di Kabupaten Lombok Utara Jumlah realisasi dana bagi hasil untuk sepuluh tahun mengalami fluktuasi, realisasi dana bagi hasil tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai Rp 67.008.782.774,00 kemudian tahun berikutnya hingga pada tahun 2018 realisasi dana bagi hasil tidak tercapai sesuai target, dimana Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menetapkan target dana bagi hasil di APBD sebesar Rp 42.303.695.000,00 namun yang terealisasi Rp 43.313.872.057,00.

Jumlah pendapatan sebagai komponen dalam APBD Kabupaten Lombok Utara merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi jumlah Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Kabupaten Lombok Utara. Sehingga secara teori mengatakan bahwa semakin besar realisasi dana bagi hasil kepada pemerintah daerah maka semakin besar jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) begitu pula sebaliknya.

Penerimaan Realisasi Dana Bagi Hasil berupa pajak yang terlalu besar pada akhir tahun dan dana tersebut tidak dapat digunakan dengan optimal, maka akan menyebabkan sisa anggaran dan berdampak pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Hubungan positif dan signifikan terjadi karena pemerintah daerah kurang akurat dalam memperkirakan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sehingga dapat menyebabkan terjadi sisa anggaran yang berdampak pada SILPA. Ini disebabkan terjadinya penumpukan dana di akhir tahun yang tidak dapat cepat dibelanjakan secara langsung sehingga menyebabkan SILPA menjadi naik. Sejalan dengan penelitian Suharna (2015) menyatakan bahwa komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir yang dominan berkontribusi terhadap peningkatan maupun penurunan SILPA berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari dana perimbangan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam. Selain itu Izudin (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara komponen pendapatan termasuk dana perimbangan pada pos DBH Pajak berpengaruh terhadap SILPA di Kabupaten Bungo.

#### b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Penelitian menunjukkan bahwa sisa belanja non modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai *t* hitung sebesar 1.288 dengan nilai probabilitas *t* hitung sebesar 0.239 lebih besar dari taraf nyata 5%. Hasil koefisien regresi sebesar 0.163. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah realisasi dana alokasi umum maka

akan menambah jumlah SILPA. Artinya setiap penambahan 1 miliar rupiah realisasi dana alokasi umum maka akan menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 0.163 miliar rupiah.

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

#### **c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai  $t$  hitung sebesar 4.283 dengan nilai probabilitas  $t$  hitung sebesar 0.004 lebih besar dari taraf nyata 5%. Hasil koefisien regresi sebesar 0.153. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah realisasi dana alokasi khusus maka akan meningkatkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Artinya setiap penambahan 1 miliar rupiah sisa belanja modal maka akan meningkatkan jumlah SILPA sebesar 0.153 miliar rupiah.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Izudin (2013) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara komponen-komponen pendapatan yang mencakup DAK terhadap SILPA. Selain itu dalam penelitiannya, Sugiantini (2015) menyatakan bahwa DAK yang tidak pernah mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu karena pemerintah pusat yang melakukan transfer ke daerah secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan begitu penyaluran dana transfer yang mendekati akhir tahun anggaran disinyalir memberikan sumbangan signifikan terhadap rendahnya realisasi DAK sehingga terbentuknya SILPA.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Secara parsial variabel realisasi dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) variabel realisasi dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), variabel realisasi dana alokasi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Secara simultan variabel dana bagi hasil, realisasi dana alokasi umum, dan realisasi dana alokasi khusus berpengaruh terhadap SILPA

Diharapkan pemerintah Kabupaten Lombok Utara lebih inovatif dalam penyusunan anggaran pembelanjaan daerah dan penentuan prioritas pelapor anggaran yang terkait dalam komponen-komponen APBD agar sesuai dengan pembangunan daerah.

#### **REFERENSI**

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. "Pengaruh dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali", *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Abdullah, Syukriy. 2004. "Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. Makalah disajikan pada seminar antarbangsa di universitas Bengkulu. Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Dulahi Darman. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah)". *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 6, ISSN: 2302-2019

- Gujarati, Darmodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zein. Jakarta: Erlangga
- Hakim, A. R. 2016. “Identifikasi Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)”. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Halim Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. “Pengelolaan Keuangan Daerah”. Yogyakarta
- Ramadhan, M. F. A., 2015. “Pengaruh Realisasi, Perubahan Anggaran Dan Temuan Audit Terhadap Silpa Pemerintah Daerah Di Indonesia”. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Siregar. B. (2015). *Akuntansi sektor publik (akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* ALFABETA. Bandung.
- Widarjono, A. (2015). *Analisis multivariat terapan (dengan program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS)*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Worrall Les, Chris Collinge, dan Tony Bill. 1998. “Managing Strategy in Local Government”. Volume 11 ISSN: 0951-3558